

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rusia dan Ukraina merupakan dua negara pecahan Uni Soviet yang secara geografis memiliki letak yang berdekatan dan kondisi sosial yang relatif sama, Namun karena beberapa faktor seperti perebutan wilayah, perbedaan politik dan faktor historis, kedua negara seringkali mengalami gesekan. Secara historis, Kekaisaran Tsar Rusia menganeksasi Krimea dari tentara Turki Ottoman pada 1783, dan sejak saat itu Krimea berada di bawah pemerintahan Rusia yang kemudian menjadi Uni Soviet, hingga pada tahun 1954 Uni Soviet yang berada dibawah pimpinan Nikita Krushev yang memindah-tangankan yuridiksi Krimea dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFSR) ke Republik Sosialis Federasi Soviet Ukraina (UkrSSR) sebagai salah satu upaya dalam memperingati 300 tahun sejak adanya Treaty of Pereiaslav tahun 1654. Pemindahtanganan Krimea dianggap sebagai salah satu upaya untuk menyatukan rasa persamaan dan seperjuangan antara warga Rusia dan Ukraina, selain itu persamaan kondisi wilayah, budaya, dan sosial-ekonomi antara Krimea dengan Ukraina juga menjadi alasan diperlukannya pemindahtanganan Krimea ke Republik Sosialis Federasi Soviet Ukraina (UkrSSR). Dan hingga runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, yang mengubah RSFSR menjadi Republik Federasi Rusia dan menjadikan Ukraina sebagai negara yang merdeka, Krimea secara berdaulat masih menjadi bagian dari Ukraina.

Meskipun secara konstitusi dan kedaulatan Krimea merupakan wilayah Ukraina, namun para warga penduduk Krimea, yang kebanyakan dihuni oleh etnis Tatar merasa bahwa mereka lebih dekat dengan Rusia secara historis, budaya, maupun sosio-ekonomi. Oleh karena itu Krimea mengadakan voting referendum pada tahun 1991 dan 1992 namun keduanya tidak di sahkan. Di tahun 1992, parlemen Rusia berusaha melakukan aneksasi Krimea dengan mengeluarkan resolusi yang menyebut bahwa pemindahtanganan Krimea ke Ukraina pada tahun 1954 yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev merupakan hal yang illegal dan tidak sah. Parlemen Rusia juga menyatakan bahwa Kota Sevastopol merupakan wilayah kedaulatan milik Rusia, namun hal ini kemudian dibantah oleh Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa resolusi Parlemen Rusia tersebut tersebut telah melanggar Piagam PBB dan perjanjian Russo Ukraina yang disepakati pada tahun 1990.

Pada 1997 diadakan Russian-Ukrainian Friendship Treaty dan menyatakan bahwa Krimea kini memiliki status sebagai Autonomous Republic of Crimea. Blomfield (2018) menyatakan bahwa pada tahun 2008, pasca terjadinya Russo-Georgian War, Volodymyr Ohryzko mengungkapkan kecemasan dan tuduhan pada Rusia karena telah membagikan paspor kewarganegaraan Rusia pada warga Krimea. Hal ini dianggap sebagai upaya provokasi untuk mengambil hati para warga Krimea dan mengintervensi kedaulatan Ukraina.

Pada tahun 2010, Viktor Yanukovych memenangkan pemilu Ukraina dan cenderung mendekati Rusia dan mengabaikan perjanjian kerjasamanya dengan Uni Eropa. Pada tahun 2010 Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian Kharkiv dimana Ukraina memberikan otoritas Rusia izin untuk menggunakan pangkalan militer dan mengoperasikan armada lautnya di Laut Krimea hingga tahun 2042 dan masa perpanjangan opsional selama 5 tahun dengan imbalan berupa potongan harga bagi Ukraina untuk suplai gas dari Rusia. Warga Ukraina pun tidak senang dengan kebijakan Yanukovych yang dirasa terlalu dekat dengan Rusia ini, sehingga menimbulkan berbagai protes di Kiev yang dinamakan Euromaidan Protest. Baik pemerintah Rusia maupun Ukraina menganggap protes ini sebagai upaya kudeta yang ditunggangi barat, sehingga pada Maret 2014 Putin pun mendapat sinyal hijau untuk melakukan agresi ke Ukraina.

Tahun 2014 merupakan tahun besar bagi kedua negara. Pada 11 Maret 2014, Krimea mengadakan referendum yang ketiga kalinya, referendum yang ketiga ini juga dibumbui oleh ketidaksukaan parlemen dan warga Krimea atas pemerintahan Ukraina yang baru. Dalam referendum ini, hasilnya mayoritas penduduk Krimea menginginkan agar Krimea bergabung menjadi bagian dari Republik Federasi Rusia. Dilansir dari BBC (2014) menurut Mikhail Malyshev, ketua panitia pemungutan suara Referendum Krimea, hampir 97% warga Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Vladimir Putin pun menyatakan ia akan mewujudkan keinginan warga Krimea, namun para pemimpin Barat menganggap bahwa voting ini bisa

menghasilkan suara persetujuan yang begitu banyak karena Rusia telah mengintimidasi mereka dan melanggar kedaulatan mereka dengan melakukan agresi ke Krimea. Pada 16 Maret 2014, Krimea pun secara formal mengumumkan kemerdekaannya, Dan kemudian pada 18 Maret 2014, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia dan Aergey Aksyonow selaku pemimpin Krimea menandatangani perjanjian dekrit yang menyatakan bahwa Rusia telah memiliki hak penuh untuk mengakui Krimea sebagai wilayahnya dan Krimea kini telah secara resmi bergabung menjadi bagian dari Rusia. Rusia pun secara resmi menganeksasi wilayah Krimea. Hal inilah yang kemudian menyulut Russo-Ukrainian War dimana kedua negara berselisih mengenai status kepemilikan wilayah Krimea.

Karena gejolak politik yang dihasilkan dari referendum dan aneksasi ini, muncul berbagai protes dari pihak yang menolak perang Russo-Ukraina, otoritas Vladimir Putin, maupun mendukung nasionalisme dan persatuan Ukraina. Selain itu juga timbul berbagai kecaman dari para pemimpin dunia terutama negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris yang mengecam tindakan aneksasi Krimea yang dilakukan Putin, hal inipun juga menyebabkan dijatuhkannya berbagai sanksi pada Rusia karena dianggap telah menerobos dan tidak menghargai konstitusi, yuridiksi, maupun kedaulatan dari Ukraina.



Gambar 1. 1. Peta wilayah konflik yang disebabkan oleh Aneksasi Krimea oleh Rusia  
 Sumber: BBC, 2014

Karena adanya banyaknya demonstran dan pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap aneksasi tersebut, di penjuru Ukraina, terutama Krimea pun memicu ketegangan. Warga sipil yang tidak setuju dan memberontak, pasukan Ukraina yang diterjunkan untuk memukul mundur demonstran dan mengamankan keadaan, hingga pasukan Rusia yang ditempatkan di wilayah Krimea dalam upaya penjagaan menyebabkan warga sipil terkatung-katung dalam ketegangan dan tidak dapat melakukan banyak hal. Ditambah lagi kegiatan formal seperti perkantoran, pabrik, maupun sekolah terhenti sementara dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dapat dilihat bahwa menurut Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, wilayah timur Ukraina berada dalam kondisi yang kacau karena adanya tindakan protes maupun pemberontakan (Ukraine Security and Defense Council, 2015)

Selain itu konflik pun terjadi di wilayah timur Ukraina, di wilayah Luhansk dan Donbass dimana wilayah tersebut memiliki populasi sebanyak 2.000.000 jiwa. Menurut Ukraine State Emergency Service, pada akhir tahun 2014, jumlah Internally Displaced Persons (IDPs) yang berasal dari wilayah Ukraina Timur 560.000 jiwa. Kebanyakan warga yang berasal dari Ukraina Timur ini mengungsi ke rumah kerabat dan sanak saudara mereka yang berada di wilayah Ukraina lain. Sementara IOM dalam laporannya pada Desember 2014 melaporkan pada akhir Desember 2014 setidaknya ada 4.634 korban tewas dan 10.243 korban yang terluka di kawasan Ukraina Timur akibat konflik tersebut, dan diperkirakan ada sekitar 5 juta warga Ukraina yang terdampak secara langsung oleh konflik tersebut.

Internally Displaced Persons (IDPs) adalah para warga yang terdampak oleh kondisi darurat di negaranya seperti perang atau konflik, berbeda dengan pengungsi yang memiliki tempat lain untuk dituju, memiliki akomodasi dan biaya untuk mencari penghidupan baru, dan telah melewati batas negara, Internally Displaced Person masih berada didalam lingkup wilayah negaranya dan tidak mampu untuk pergi dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. IDPs seringkali hidup di bawah kondisi yang memprihatinkan karena kurangnya taraf kehidupan mereka akibat adanya perang atau konflik di negaranya. Mereka tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal karena hilangnya fasilitas yang biasanya digunakan untuk bekerja, ketidakamanan kondisi hidup atau terbatasnya akses akibat konflik dan perang.

Banyak dari IDPs ini yang menjalankan hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan alias terkatung-katung di tengah ketidakpastian kondisi negara.

Banyak dari warga Ukraina ini merupakan warga sipil yang secara ekonomi cukup terbatas karena terganggunya kegiatan perekonomian, Berpindah ke tempat yang lebih aman, sejahtera serta mampu untuk di diami adalah pilihan dari banyak orang, namun karena beberapa faktor, mereka belum bisa berpindah atau bermigrasi. Faktor pertama adalah negara tujuan migrasi yang memiliki birokrasi yang sulit untuk para IDPs. Negara-negara tersebut belum membuka kuota, perbatasan atau kebijakan untuk menerima warga dari negara negara yang sedang dilanda konflik. Aplikasi visa maupun izin tinggal juga harus menunggu persetujuan dari negara yang dituju, dokumen imigrasi pun tidak dapat langsung jadi sehingga warga yang telah mengajukan permohonan asylum atau izin tinggal sementara pun banyak yang terhenti.

Beberapa negara memang mengizinkan para warga Krimea dan membuka perbatasan negaranya untuk para IDPs Krimea, contohnya Polandia. Namun banyak negara yang membatasi warga Krimea yang ingin mencari perlindungan dan penghidupan yang lebih baik, sehingga arus migrasi pun terhenti dan banyak warga Krimea yang terpaksa harus bertahan di Ukraina. Beberapa demonstrasi juga diadakan di kedutaan-kedutaan agar negara lain mau membuka border atau memudahkan urusan birokrasi untuk aplikasi visa dan izin tinggal.

Dengan kondisi keuangan yang terbatas bahkan untuk bertahan hidup di kampung halaman dan tidak mempunyai satupun sanak saudara yang mampu membantu dan menampung mereka di luar negeri, pilihan untuk pergi ke luar negeri bukanlah pilihan yang realistis. Oleh karena itu, alternatif yang paling banyak diambil antara lain mengungsi ke rumah sanak saudara, kenalan atau kerabat yang dirasa lebih aman, disana mereka mampu untuk hidup secara kolektif namun tetap dalam kondisi yang terbatas dan memprihatinkan. Selain itu dukungan moral yang didapat jika berada bersama keluarga dan kerabat juga menjadi kekuatan tersendiri bagi warga Ukraina meskipun sedang berada dalam kondisi konflik.

Meskipun begitu, kondisi di lapangan yang sebenarnya sangatlah memprihatinkan sehingga dukungan moral saja tidak cukup bagi keberlangsungan hidup para Internally Displaced Persons ini. Musim dingin membuat kondisi lapangan makin sulit karena terbatasnya akses pemanas, makanan maupun tempat tinggal. Para warga yang berusia lanjut membutuhkan kondisi kehidupan yang lebih baik agar tidak membahayakan kesehatannya, bayi dan anak-anak memerlukan barang-barang penunjang kehidupan serta pertumbuhan.

Menurut survey yang dilakukan IOM, dalam periode 2014-2017 kebanyakan Internally Displaced Persons telah mengalami pemindahan selama lebih dari dua tahun sejak terjadinya aneksasi Krimea oleh Rusia. Yang artinya sejak terjadinya aneksasi Krimea oleh Rusia, 66% dari responden survey tersebut sama sekali belum pernah kembali ke tempat tinggal asalnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara

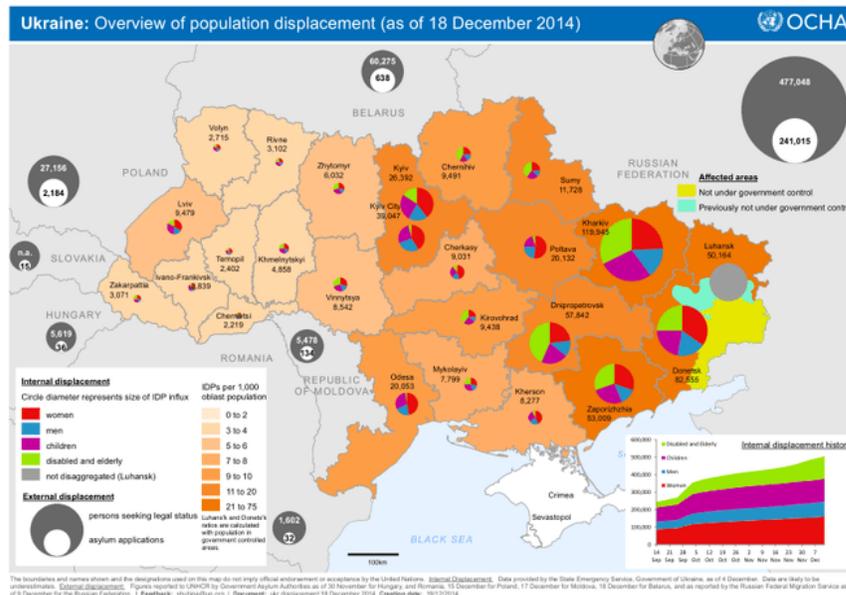
lain kehilangan pekerjaan yang membuat mereka enggan untuk kembali ke kampung halamannya dan memutuskan tinggal dengan sanak saudara, maupun ketidakpercayaan terhadap kondisi keamanan. Mereka menganggap konflik masih belum usai dan akan terus berlanjut sehingga lebih aman untuk tinggal bersama sanak keluarga yang lain.

Tabel 1. 1 Durasi displacement / perpindahan IDPs di Ukraina pada tahun 2017

Lamanya <i>displacement</i> / pemindahan	Presentase
<6 bulan	6%
6-12 bulan	11%
12-18 bulan	4%
18-24 bulan	13%
>24 bulan	66%

Sumber: National Monitoring System Report, December 2017

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) merilis peta persebaran Internally Displaced Persons sesaat setelah aneksasi Krimea oleh Rusia. Dapat dilihat bahwa kebanyakan Internally Displaced Persons berasal dari wilayah Ukraina Timur dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru negeri.



Gambar 1. 2 Perkiraan Jumlah Populasi IDPs di Ukraina pada Desember 2014

Sumber: OCHA Ukraine Situation Report No. 21, 2014

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) merilis laporan pada Agustus 2014 yang menjabarkan bahwa sekitar 117.000 orang telah diregistrasi sebagai Internally Displaced Persons oleh UNHCR seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2 diatas. Dimana kebanyakan IDPs adalah wanita dan anak-anak dan 13% dari IDPs tersebut berasal dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Untuk sementara keperluan yang paling banyak dibutuhkan adalah pangan dan tempat tinggal, namun tantangan bagi para IDPs akan bertambah seiring memasuki tahun ajaran baru bagi sehingga mereka harus memikirkan pendidikan bagi anak-anak, serta musim dingin yang akan segera datang sehingga dibutuhkan kebutuhan pendamping seperti pakaian hangat atau penghangat ruangan.

Pendataan untuk para IDPs ini juga terkendala karena banyak IDPs yang tidak tinggal di area perkotaan yang mudah dijangkau, banyak yang masih menetap di

rumah sanak saudaranya dan tidak melaporkan kondisi mereka ke pihak berwajib, selain itu pemerintah daerah serta pemerintah Ukraina dianggap kurang memiliki acuan dan kerangka hukum untuk mengatasi masalah Internally Displaced Persons. Hal itu menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dan kebutuhan di lapangan, tumpang tindih dan tidak terkoordinasinya bantuan serta pendataan bagi IDPs.

Kondisi hidup yang makin memperihatinkan membuat banyak warga takut akan keselamatan keluarganya. Serangan militer, serangan fisik, harga pangan dan bahan bakar yang melonjak, pasokan listrik dan air yang terhenti, bank, toko, kantor-kantor pemerintahan yang tidak berfungsi, membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain berpindah. Mereka pun kebanyakan hanya membawa barang penting seperti dokumen pribadi, uang tunai, serta obat-obatan dan meninggalkan barang-barang berat di rumah dengan harapan kelak mereka bisa kembali.

Karena kebanyakan IDPs terdiri dari warga Krimea, jumlah penumpang moda transportasi pun membludak. Di wilayah Ukraina Timur, terjadi kesulitan untuk mengakomodasi tiket perjalanan, baik karena kesulitan membelinya atau karena tidak mampu untuk membayarnya karena setelah aneksasi, otoritas Rusia memerintahkan bank-bank milik pemerintah / swasta asal Ukraina untuk tutup. Dan menyatakan hanya Rubel yang kini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini menyebabkan banyak warga yang kehilangan tabungan, uang jaminan sosial atau uang pensiunan yang memiliki mata uang Hryvnia.

Selain itu banyak moda transportasi umum yang kacau dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena sector publik terdampak oleh aneksasi Krimea. Karena masalah birokrasi dan pemindah tangan kekuasaan, kantor-kantor pemerintahan Ukraina pun ditutup, beberapa sarana yang dioperasikan oleh negara pun mandek. Beberapa stasiun tutup, serta bus-bus umum pun tidak beroperasi. Kebanyakan mereka ingin pergi dari wilayah timur Ukraina ke tempat sanak saudara yang dianggap lebih kondusif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, didapatkan satu rumusan masalah yaitu “Apa upaya yang dilakukan oleh International Organization of Migration (IOM) untuk menangani Internally Displaced Persons (IDPs) di Ukraina pasca aneksasi Krimea oleh Rusia dalam periode tahun 2014-2017?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian ini dibuat sebagai suatu wawasan atau pengetahuan yang dimuat dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selain itu penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata 1 di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi warga Ukraina sebagai pihak yang terdampak setelah aneksasi

Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, bagaimana warga Ukraina yang terancam oleh ketegangan di wilayah timur Ukraina terdampak dan menjadi Internally Displaced Person (IDPs) demi menyelamatkan jiwanya atau mendapat penghidupan yang lebih layak. Serta bagaimana IOM sebagai organisasi internasional memberikan upayanya untuk membantu para IDPs di Ukraina.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Internally Displaced Persons**

Menurut Churruca Muguruza dan Garcia (2017), Internally Displaced Persons memiliki pengertian yaitu perorangan atau kelompok yang dipaksa untuk meninggalkan kediaman, rumah atau kampung halamannya karena akibat dari adanya konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, bencana yang diakibatkan ulah manusia, atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak melewati batas resmi dari suatu wilayah negara. Berbeda dengan pengungsi atau *refugees* yang meninggalkan negara asalnya, Internally Displaced Persons tetap berada dalam wilayah negara asalnya dan memiliki hak dan kewajiban yang tetap sebagaimana warga negara mestinya. Namun, mereka adalah golongan yang rawan dan membutuhkan bantuan khusus.

Adanya Internally Displaced Persons ini akan menimbulkan banyak dampak seperti hilangnya lapangan pekerjaan, menurunnya standar hidup warga, hilangnya kesempatan untuk bekerja dan bersekolah, menurunnya indeks harapan hidup secara nasional, serta ketidakstabilan dalam negeri. Karena dampak-dampak tersebut muncul ancaman-ancaman seperti terganggunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

negara, ancaman terjadinya hak pelanggaran hak asasi manusia seperti bekerja, mendapat keamanan, mengenyam pendidikan, melakukan ibadah, ataupun menggunakan hak memilih dan hak politik lainnya, ancaman terpisahnya keluarga karena perpindahan / *displacement* yang terjadi, serta ancaman kesehatan dan keselamatan terhadap para IDPs.

#### **1.4.2 Upaya Organisasi Internasional**

Luegi dan Mardianti (2021) berpendapat bahwa Organisasi Internasional memiliki peran dalam menangani konflik, mengatasi permasalahan kemanusiaan yang ada, membantu permasalahan yang timbul karena bencana alam, kelaparan, kekeringan ataupun wabah penyakit. Selain itu Organisasi Internasional juga bergerak sesuai bidang dan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu Organisasi Internasional mampu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Karena meningkatnya permasalahan di belahan dunia dan meningkatnya hubungan transnasionalisme, globalisasi dan hubungan internasional, kebutuhan akan organisasi internasional pun muncul sebagai suatu badan terkoordinasi yang menanungi anggotanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Chumakov (2016) menyatakan Organisasi Internasional menghadirkan sistem, panduan, sumber daya, kebijakan, dan bantuan bagi sesama anggota dalam membuat upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Sholihah (2019), Organisasi Internasional memiliki fungsi yang disebut Inisiator, Fasilitator dan Determinator. Fungsi ini mencakup beberapa upaya atau langkah yang dapat dilakukan oleh Organisasi Internasional. Inisiator berarti mereka mengambil langkah pencegahan atau cepat tanggap tentang suatu masalah. Hal ini bisa berupa upaya seperti pembuatan layanan delik aduan atau pembuatan database tentang kondisi wilayah yang rawan akan permasalahan yang dihadapi. Fasilitator berarti mereka menghadapi permasalahan secara langsung, upaya yang dilakukan bisa berupa mengkoordinasikan bantuan, mendata korban yang terdampak, atau menyalurkan humanitarian assistance secara langsung. Sementara peran determinator berarti organisasi internasional akan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya, dari segi penanganan maupun dengan para korban yang terdampak. Entah akan dibuat rencana lanjutan atau memutuskan untuk diakhirinya suatu program.

#### **1.4.3 Upaya Monitoring**

Dalam menjalankan fungsi suatu organisasi, diperlukan suatu upaya dalam mengawasi bagaimana kinerja sumber daya yang dimiliki, progress suatu program atau hasil dari sebuah kebijakan, tak terkecuali bagi United Nations maupun organisasi-organisasi internasional yang berada dibawah naungannya. Menurut Brudan (2010), sebuah organisasi memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dirasa bisa meningkatkan performanya seperti peningkatan kinerja sumber

dayanya, peningkatan performa organisasi, serta peningkatan hasil kinerja yang drastis dan terlihat nyata.

Hal ini termasuk dengan mengadakan upaya monitoring bagi kinerja lapangan yang dilakukan suatu organisasi, dengan upaya monitoring ini, akan didapatkan gambaran kondisi yang riil dan valid terkait keadaan di lapangan. Kerzner (2013) menyatakan hasil dari fungsi monitoring ini selanjutnya akan dianalisis dan digunakan untuk menentukan kelebihan dan kekurangan yang ada di lapangan. Dengan hasil monitoring ini organisasi akan mampu untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil dan menemukan kebijakan yang sesuai. Selain itu juga untuk menyesuaikan tujuan dan orientasi baru terkait kondisi di lapangan.

Monitoring yang dimaksud memiliki cakupan antara lain:

- Mendapatkan data yang valid atas perkembangan di lapangan
- Menganalisis kekuatan yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, kantor-kantor yang dapat membantu, koneksi dengan pihak-pihak lain, maupun kekuatan finansial yang dimiliki.
- Menganalisis kelemahan yang dimiliki, seperti kurangnya sumber daya yang dapat dikerahkan, kurang terlihatnya hasil di lapangan, maupun kurangnya arah yang dimiliki organisasi
- Mengidentifikasi ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya program, serta memahami akibat yang kemungkinan akan terjadi jika kinerja program tidak meningkat

- Mengidentifikasi langkah dan strategi yang harus diambil dalam mengatasi permasalahan secara spesifik

Karena fungsinya yang vital dalam suatu program, Dragichi, Popescu dan Gogan (2014) mengambil kesimpulan bahwa Fungsi monitoring ini sangat di perlukan bagi perkembangan dan kemajuan program kerja di suatu organisasi.

#### **1.4.4 Humanitarian Assistance**

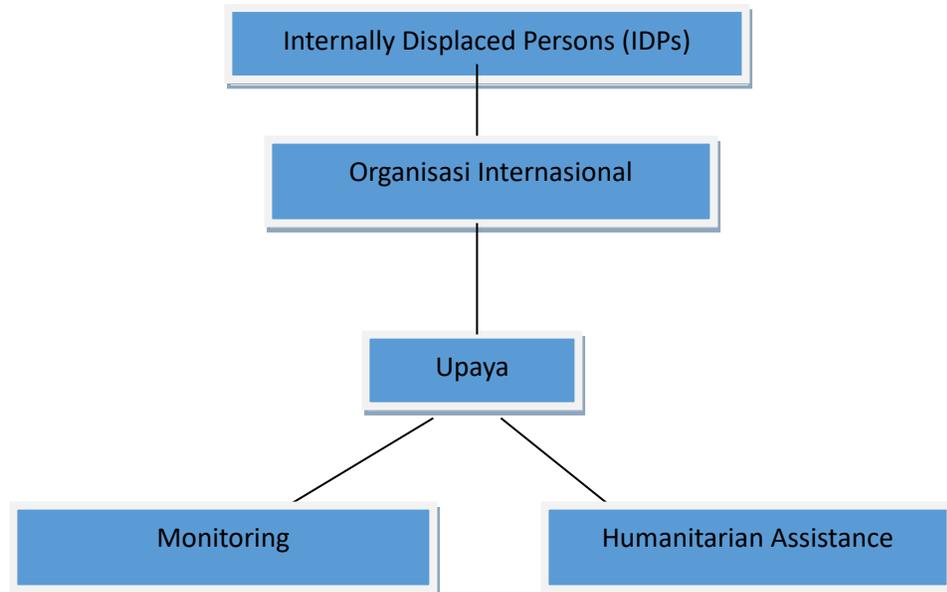
Menurut Pease (2016), Organisasi Internasional memiliki suatu peran sebagai Aid provider yang dapat diwujudkan dalam bentuk upaya pemberian Humanitarian Aid atau Humanitarian Assistance. Humanitarian aid / assistance ini biasanya berbentuk bantuan luar negeri yang berupa dana hibah atau pinjaman lunak yang diberikan melalui beberapa lembaga donor Internasional. Bantuan luar negeri ini biasanya berbentuk devisa atau mata uang yang digunakan untuk menutup pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan warga yang terdampak seperti bahan pangan, komoditas sehari-hari dan obat-obatan. Selain dalam bentuk material atau kebendaan, Pease (2016) juga menyatakan Humanitarian Assistance dapat berupa pendanaan untuk pembangunan kembali, bantuan sosial, psikologis, serta perencanaan untuk pencegahan dalam jangka pendek maupun panjang, dalam ranah migran, pengungsi atau IDPs hal ini dapat berupa repatriasi, integrasi dengan penduduk lokal atau *resettlement*.

Tujuan utama dari Humanitarian Assistance ini adalah memastikan bahwa para korban yang terdampak benar-benar mendapatkan bantuan. Kebanyakan IDPs

merupakan hasil dari adanya pelanggaran HAM yang ada didalam negara mereka sendiri, hal ini membuat masyarakat internasional, termasuk para Organisasi internasional memiliki kewajiban untuk menolong. Negara tetap menjadi actor utama dalam penyelesaian masalah tersebut dan berhak untuk meminta, menerima atau menolak bantuan tersebut.

Riyanto (2007) berpendapat bahwa Humanitarian Assistance merupakan bantuan yang diberikan oleh Organisasi Internasional sebagai bentuk dari kesepakatan atau keinginan dari masyarakat internasional. Adanya Organisasi Internasional yang memberikan bantuan kepada negara yang memiliki banyak Internally Displaced Persons merupakan salah satu perwujudan Humanitarian Assistance, bukan suatu bentuk intervensi ke negara berdaulat. Humanitarian Assistance diberikan kepada negara-negara yang terdampak sangat berat sehingga tidak mampu mengatasinya sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain.

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan diatas menjelaskan bahwa, dengan adanya Aneksasi Krimea pada tahun 2014, membuat banyak warga di Ukraina pun menjadi Internally Displaced Persons (IDPs). IDPs ini merupakan tanggung jawab Organisasi Internasional. Karena banyaknya jumlah IDPs di Ukraina dan statusnya yang darurat untuk segera diberi pertolongan, Organisasi Internasional pun melakukan dua upaya yakni Upaya Monitoring dan Upaya Humanitarian Assistance.

## 1.6 Argumen Utama

Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa Aneksasi Krimea oleh Rusia yang terjadi pada Maret 2014 telah menyebabkan ketegangan di wilayah Krimea dan menyebabkan banyaknya IDPs di Ukraina. Hal ini mendorong IOM sebagai Organisasi Internasional yang bertanggung jawab atas migrasi dan Internally

Displaced Persons (IDPs) harus bertindak. IOM mengatasi masalah Internally Displaced Persons yang terjadi di Ukraina pasca aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014-2017 melalui dua upaya yakni:

1. **National Monitoring System Report on Internally Displaced Persons** yang datanya memuat jumlah total dan informasi demografi IDPs yang ada di Ukraina. Data ini kemudian digunakan sebagai acuan badan, pemerintah atau organisasi internasional lain sebagai acuan yang mana dibutuhkan untuk mengkalkulasi jumlah uang, donor atau bantuan yang dibutuhkan. Data ini di perbarui secara berkala sehingga dapat dilakukan pengamatan perubahan data tiap waktunya sehingga fungsi monitoring benar-benar terlaksana.
2. **IOM's Assistance to Internally Displaced Persons** yang bertujuan untuk memberikan dan mengkoordinasikan bantuan untuk IDPs berupa *humanitarian assistance* dalam bentuk bantuan logistik maupun bantuan berupa pelatihan skill dan modal untuk membuka usaha yang berguna bagi IDPs baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak mendapatkan data secara langsung namun melalui *library research* yang didapat dari buku, jurnal, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah sebelumnya yang relevan, dan dokumen resmi baik secara online maupun

offline. Dalam penelitian ini sumber yang menjadi acuan penulis adalah artikel, jurnal, dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh International Organization of Migration melalui laman resminya.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan membahas upaya yang dilakukan oleh International Organization of Migration dalam mengatasi krisis IDPs di Ukraina pasca Aneksasi Krimea. Penelitian hanya akan membahas upaya IOM dalam periode tahun 2014-2017. Penulis memilih periode tersebut karena 2014 merupakan tahun dimana aneksasi Krimea, yang saat itu menjadi bagian dari Ukraina terjadi, dan di tahun-tahun berikutnya menjadi tahun dimana banyak warga Ukraina yang bermigrasi untuk meninggalkan Ukraina demi keamanannya.

Tahun 2017 merupakan tahun dimana Uni Eropa dan Ukraina mencapai sebuah kesepakatan dimana pada tanggal 11 Juli, di puncak konferensi EU-Ukraina di Kiev, Dewan Uni Eropa dan Ukraina setuju untuk saling mendorong berbagai upaya dalam bidang perdagangan, kebijakan luar negeri, keadilan, teknologi, pendidikan, dan keamanan termasuk migrasi yang memungkinkan negara Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakan imigrasi mereka sehingga para IDPs atau migran dari Ukraina dapat mengajukan aplikasi visa atau permohonan tinggal sementara di Uni Eropa. Dan dengan ini para IDPs di Ukraina ini pun memiliki kesempatan untuk bisa memasuki border wilayah Uni Eropa.

### **1.7.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah Teknik analisis induktif dimana menurut Sugiyono (2018) adalah analisis berdasar data yang kemudian dijabarkan untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Penulis menyusun secara menjelaskan data yang diperoleh secara deskriptif untuk mengkategorikan data yang diperoleh menjadi suatu keutuhan dan mengelompokkan data tersebut ke unit yang tepat. Data juga di analisis untuk kemudian mendapatkan sintesa agar didapatkan kesimpulan dan hasil penelitian.

### **1.7.4 Tipe Penelitian**

Penelitian ini memiliki tipe deskriptif, menurut Sugiyono (2018) penelitian tipe deskriptif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan objek untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Dimana penelitian deskriptif ini akan menjelaskan dan memaparkan keadaan objek yang diteliti dengan apa adanya, yang mana dalam penelitian ini akan menjelaskan upaya International Organization of Migration dalam mengatasi krisis Internally Displaced Persons pasca Aneksasi Krimea tahun 2014 dalam periode tahun 2014-2017.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Bab 1 dari penelitian ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, kerangka pemikiran, sintesa penelitian dan argumen utama penulis dari penelitian yang berjudul Upaya International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi Internally Displaced Persons (IDPs) di Ukraina pasca Aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014-2017.

Bab 2 menjelaskan secara rinci upaya IOM dalam mengatasi krisis IDPs di Ukraina tahun 2014-2017 dengan sistem pangkalan datanya yaitu National Monitoring System Report on Internally Displaced Persons secara berkala sejak 2014-2017.

Bab 3 menjelaskan secara rinci upaya IOM dalam mengatasi krisis IDPs di Ukraina dengan pengadaan IOM's Assistance to Internally Displaced Persons secara berkala sejak tahun 2014-2017.

Bab 4 memuat kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran dari penulis

